

KEMAMPUAN PERTUMBUHAN EKONOMI MEMODERASI PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, DAU DAN DBH PADA BELANJA MODAL

I Putu Bagus Indra Mulia Nugraha¹
A.A.N.B Dwirandra²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia
e-mail: indramulia18@yahoo.com

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia

ABSTRAK

Variabel *independent* seperti pajak daerah, retribusi daerah, DAU, DBH, dan pertumbuhan ekonomi diduga tidak selalu berpengaruh linier pada Belanja Modal, dikarenakan adanya faktor kontinjensi yang mempengaruhi hubungan tersebut. Salah satu faktor kontinjensi tersebut adalah pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan pertumbuhan ekonomi memoderasi pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, DAU dan DBH pada belanja modal. Penelitian mencakup semua Kabupaten/Kota di Provinsi Bali dalam rentang waktu amatan 2009-2013. Metode sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel jenuh. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pajak daerah, retribusi daerah, DAU dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif pada belanja modal sedangkan DBH tidak berpengaruh pada belanja modal. Pertumbuhan ekonomi mampu memoderasi pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah pada belanja modal, namun tidak mampu memoderasi pengaruh DAU dan DBH pada belanja modal.

Kata kunci: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAU, DBH, Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Modal

ABSTRACT

Independent variables such as local taxes, levies, DAU, DBH, and economic growth is presumed not always linear effect on capital expenditures, due to contingent factors that influence the relationship. One such contingency factor is economic growth. This research aims to know the ability of economic growth moderating influence of local taxes, levies, DAU and DBH in capital expenditure. The research covers eight counties and one city in the province of Bali in the span of observations from 2009 to 2013. Sampling method used in this study is saturated sample. The results show that local taxes, levies, DAU and economic growth positive effect on capital spending while DBH no effect on capital spending. Economic growth is able to moderate the effect of local taxes and levies on capital expenditure, but not able to moderate the influence of DAU and DBH in capital expenditure.

Keywords: Local Taxes, Levies, DAU, DBH, Economic Growth, Capital Expenditure

PENDAHULUAN

Diberlakukannya Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, dimana hubungan Pemerintah

Daerah yang diberikan kewenangan lebih besar untuk mengatur pemerintahan daerahnya. Alokasi sumber daya ke dalam belanja-belanja dengan menganut asas kepatutan, kebutuhan dan kemampuan daerah merupakan bentuk penegasan bahwa di dalam Undang-undang tersebut daerah memiliki kewenangan mengatur sendiri pemerintahan daerahnya.

Pemerintah Daerah perlu memberikan alokasi belanja yang lebih besar dalam era desentralisasi fiskal saat ini, yang didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun fasilitas publik. Diharapkan terjadi peningkatan pelayanan diberbagai sektor, terutama sektor publik dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal ini, sehingga akan menjadi daya tarik tersendiri bagi investor untuk dapat untuk membuka usaha di daerah. Jadi, sudah sepantasnya pemerintah mengubah komposisi belanja, yang dimana selama ini belanja daerah dialokasikan ke dalam belanja operasi yang nyatanya kurang berdampak terhadap peningkatan pelayanan publik. Dalam hal ini Pemerintah Daerah dinilai harus mampu lebih bijak dalam mengalokasikan anggaran belanjanya khususnya belanja modal. Jadi, membuka kesempatan berinvestasi bagi para investor merupakan salah satu cara yang efektif untuk memfasilitasi berbagai aktivitas peningkatan perekonomian.

Salah satu sumber yang paling penting dalam penyelenggaraan desentralisasi adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Besar kecilnya PAD dapat meningkatkan atau mengurangi ketergantungan daerah pada Pemerintah Pusat. PAD adalah sumber pendanaan utama yang dimiliki Pemerintah Daerah. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Warsito Kawedar, dkk. 2008). Dana perimbangan merupakan bentuk pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang berupa pengalihan dana, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang sebagaimana telah dijelaskan dalam Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. DAU merupakan dana yang bersumber dari APBN yang disalurkan ke Pemerintah Daerah untuk mengatasi kesenjangan keuangan antar daerah. Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Eka (2014) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh PAD, DAU dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Pemoderasi, dimana hasil dari penelitiannya menunjukkan Pendapatan Asli Daerah, DAU dan SiLPA terbukti berpengaruh positif terhadap Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi mampu memoderasi Pendapatan Asli Daerah, DAU, tetapi tidak mampu memoderasi SiLPA terhadap Belanja Modal. Karina (2013) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAU dan DAK terhadap Belanja Modal menunjukkan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal, sedangkan DAU dan DAK berpengaruh negatif terhadap Belanja Modal. Yossi Mamonto, dkk (2013) dalam penelitiannya yang berjudul pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal

menemukan hasil yang berbeda yaitu, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Terkait dengan peningkatan penerimaan daerah seperti Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAU dan DBH dapat dikatakan bahwa tidak selalu mampu meningkatkan Belanja Modal melainkan ada faktor kontinjensi, salah satu diantaranya adalah pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan pada sektor ekonomi tingkat perkembangan aktivitas dalam suatu perekonomian dapat diukur dengan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan beberapa penelitian yang terdahulu yang diuraikan di atas menunjukkan hasil yang berbeda. Terdapat perbedaan hasil penelitian antara beberapa peneliti dengan variabel yang sama, hal ini menyebabkan ketertarikan penulis untuk meneliti lebih lanjut mengenai pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum, dan dana bagi hasil serta pengaruhnya pada belanja modal. Perbedaannya, pada penelitian ini penulis menggunakan pertumbuhan ekonomi sebagai yang memoderasi pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, DAU, DBH pada belanja modal.

Berdasarkan pemaparan diatas, pokok permasalahan diambil penelitian ini adalah: 1) Apakah Pajak Daerah berpengaruh pada Belanja Modal?; 2) Apakah Retribusi Daerah berpengaruh pada Belanja Modal?; 3) Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh pada Belanja Modal?; 4) Apakah Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh pada Belanja Modal?; 5) Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh pada Belanja Modal?; 6) Apakah Pertumbuhan Ekonomi memoderasi pengaruh Pajak Daerah pada Belanja Modal?; 7) Apakah Pertumbuhan Ekonomi memoderasi pengaruh Retribusi Daerah pada Belanja Modal?; 8) Apakah

Pertumbuhan Ekonomi memoderasi pengaruh DAU pada Belanja Modal?; 9) Apakah Pertumbuhan Ekonomi memoderasi pengaruh DBH pada Belanja Modal?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui pengaruh Pajak Daerah pada Belanja Modal; 2) Untuk mengetahui pengaruh Retribusi Daerah pada Belanja Modal; 3) Untuk mengetahui pengaruh DAU pada Belanja Modal; 4) Untuk mengetahui pengaruh DBH pada Belanja Modal; 5) Untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi pada Belanja Modal; 6) Untuk mengetahui kemampuan Pertumbuhan Ekonomi memoderasi pengaruh Pajak Daerah pada Belanja Modal; 7) Untuk mengetahui kemampuan Pertumbuhan Ekonomi memoderasi pengaruh Retribusi Daerah pada Belanja Modal; 8) Untuk mengetahui kemampuan Pertumbuhan Ekonomi memoderasi pengaruh DAU pada Belanja Modal; 9) Untuk mengetahui kemampuan Pertumbuhan Ekonomi memoderasi pengaruh DBH pada belanja modal.

Teori *Fiscal Federalism* dan Otonomi Daerah

Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menyebutkan bahwa Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Akai & Sakata (2002) dalam penelitiannya menyatakan Teori *Fiscal Federalism* merupakan sebuah bentuk perwujudan pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah tingkat bawah. Sementara itu, Malik *et al.* (2006) menyatakan strategi yang paling efektif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah desentralisasi struktur fiskal suatu negara.

Maggi dan Ladurner (2009) menyatakan keputusan politik yang diambil oleh pemerintah dapat dilihat lebih dalam dengan menggunakan *New Perspective Theory of Fiscal Federalism*. Teori federalisme fiskal merupakan teori yang menjelaskan tentang bagaimana hubungan desentralisasi dengan perekonomian, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat. Desentralisasi fiskal merupakan pelimpahan wewenang menjalankan pemerintahan oleh Pusat kepada Daerah yang dapat berimbas pada pertumbuhan ekonomi (Bodman *et al.* 2009).

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan merupakan suatu hubungan antara dua pihak atau lebih dimana pihak pertama disebut prinsipal dan pihak yang lainnya disebut dengan agen. Prinsipal merupakan pihak yang bertindak sebagai pemberi perintah dan bertugas untuk mengawasi, memberikan penilaian dan masukan atas tugas yang telah dijalankan oleh agen. Sedangkan agen adalah pihak yang menerima dan menjalankan tugas sesuai dengan kehendak prinsipal. Halim dan Abdulah (2006) menyatakan teori keagenan (*Agency Theory*) merupakan teori yang menghubungkan antara prinsipal dengan agen. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa *Agency Theory* merupakan hubungan yang menjelaskan bahwa adanya kontrak yang mana prinsipal menyewa agen.

Pajak daerah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembangunan daerah. Sianturi (2010), dalam penelitiannya menyatakan terdapat keterkaitan antara pajak

daerah dengan alokasi belanja modal. Semakin besar pajak yang diterima oleh Pemerintah Daerah, maka semakin besar pula PAD. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Arifin (2014) dan Karina (2013) yang mengatakan pajak daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Pajak Daerah berpengaruh positif pada belanja modal

Meningkatkan PAD dari sektor retribusi daerah adalah salah satu cara untuk mewujudkan kemandirian daerah. Meningkatnya retribusi daerah secara tidak langsung juga akan meningkatkan PAD sehingga dapat meningkatnya pengalokasian belanja modal. Harianto (2007) menyatakan bahwa PAD yang semakin tinggi akan merangsang pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanannya kepada publik. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Sulistyowati (2011) dan Karina (2013), yang mengatakan retribusi daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal. Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H₂ : Retribusi Daerah berpengaruh positif pada belanja modal.

Penelitian Holtz-Eakin *et. al.* (1985) dalam Darwanto dan Yustikasari (2007) menyatakan bahwa ada keterkaitan yang sangat erat antara dana bantuan dari Pusat dengan belanja Daerah. Meskipun otonomi daerah telah dilaksanakan sejak tahun 2001, namun kenyataannya masih terdapat beberapa Kab/Kota yang masih mengandalkan sumber pendanaannya pada dana perimbangan. Besarnya tingkat penerimaan DAU dipastikan akan menambah jumlah pendapatan Daerah. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Harianto (2007), Andriana (2008) dan

Mayasari (2014) yang mengatakan DAU berpengaruh positif terhadap belanja modal. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H₃ : DAU berpengaruh positif pada belanja modal.

Sumber dana perimbangan yang kedua adalah Dana Bagi Hasil (DBH). Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No.33 Tahun 2004). DBH yang diterima pemerintah daerah yang merupakan bantuan dana dari pemerintah pusat terdiri dari 2 jenis, yaitu DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam. Belanja modal yang besar sudah tentu berasal dari DBH yang besar pula, begitu juga sebaliknya, pemerintah tidak akan mampu mengalokasikan belanja modal yang besar apabila DBH daerah juga kecil. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Darmayasa (2014), Wandira (2013), dan Maryadi (2014) yang mengatakan DBH berpengaruh positif terhadap belanja modal. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H₄ : DBH berpengaruh positif pada belanja modal

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat diukur dengan PDRB. Oates (1993) dalam Lin dan Liu (2000) menyatakan bahwa bahwa antara desentralisasi dengan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang positif. Sehingga Pemda dapat mendistribusikan belanja modal yang lebih besar daripada belanja operasi yang kurang efektif (Felix, 2012).Salih (2012) dalam penelitiannya, menyatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi memiliki hubungan yang positif dengan belanja modal. Terdapat pengaruh yang positif antara pertumbuhan ekonomi dan belanja

modal (Taiwo dan Abayomi, 2011). Berdasarkan uraian tersebut maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H₅ : Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif pada alokasi belanja modal.

Tingginya pendapatan yang didapat masyarakat, maka akan berdampak pada kemampuan masyarakat untuk membayar kewajiban pada pemerintah daerah. Sehingga sumber penerimaan daerah yang berasal dari PAD meningkatkan yang akan digunakan untuk memberikan pelayanan publik demi meningkatkan belanja modal. Terdapat pengaruh yang positif antara pertumbuhan ekonomi dan belanja modal (Taiwo dan Abayomi, 2011). Berdasarkan penjabaran yang telah dijelaskan, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H₆: Pertumbuhan ekonomi memoderasi pengaruh pajak daerah pada belanja modal.

H₇: Pertumbuhan ekonomi memoderasi pengaruh retribusi daerah pada belanja modal.

H₈: Pertumbuhan ekonomi memoderasi pengaruh DAU pada belanja modal.

H₉: Pertumbuhan ekonomi memoderasi pengaruh DBH pada belanja modal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data yang berupa angka yang dapat diukur satuannya (Sugiyono, 2012:12).. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, dengan menggunakan teknik sampling jenuh dengan menggunakan seluruh populasi digunakan sebagai sampel. Metode

pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi, dengan mengamati Laporan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota di Provinsi Bali selama periode pengamatan. Definisi operasional masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

1) Pajak Daerah (PD) (X1)

Pajak Daerah untuk masing-masing daerah yang menjadi fokus dalam penelitian ini dapat dilihat dari laporan realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah periode amatan tahun 2009-2013.

2) Retribusi Daerah (RD) (X2)

Retribusi Daerah untuk masing-masing daerah yang menjadi fokus dalam penelitian ini dapat dilihat dari laporan realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah periode amatan tahun 2009-2013.

3) Dana Alokasi Umum (DAU) (X3)

DAU untuk masing-masing daerah yang menjadi fokus dalam penelitian ini dapat dilihat dari laporan realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah periode amatan tahun 2009-2013.

4) Dana Bagi Hasil (DBH) (X4)

DBH untuk masing-masing daerah yang menjadi fokus dalam penelitian ini dapat dilihat dari laporan realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah periode amatan tahun 2009-2013.

5) Pertumbuhan Ekonomi (PE) (X5)

Pertumbuhan Ekonomi untuk masing-masing daerah yang menjadi fokus dalam penelitian ini dapat dilihat dari laporan Produk Domestik Regional Bruto periode amatan tahun 2009-2013

6) Belanja Modal (BM) (Y)

Belanja Modal untuk masing-masing daerah yang menjadi fokus dalam penelitian ini dapat dilihat dari laporan realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah periode amatan tahun 2009-2013.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi *Moderated Regression Analysis* yang diuji dengan tingkat signifikansi 0,05 yang digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat serta menguji pengaruh variabel moderasinya, namun sebelumnya dilakukan pengujian terhadap data dalam penelitian dengan menggunakan pengujian asumsi asumsi klasik untuk memastikan data terdistribusi normal, dan tidak mengandung unsur autokorelasi, multikolinearitas, heteroskedastisitas. Berdasarkan analisis MRA tersebut dilakukan pengujian koefisien determinasi (R^2), uji kesesuaian model (Uji F), dan uji signifikansi individual (Uji t).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan data amatan sejumlah 9 kabupaten/kota x 5 tahun = 45 amatan, kemudian 9 data yang dikategorikan *outlier* dikeluarkan sehingga menjadi 36 data penelitian, 36 data penelitian telah dilakukan uji asumsi klasik dan telah memenuhi kriteria pengujian asumsi klasik. Uji asumsi klasik dilakukan

untuk mengetahui apakah data terdistribusi secara normal, model regresi tidak mengandung multikolinearitas, autorelasi dan heteroskedastisitas.

Berikut pada Tabel 1 adalah hasil uji normalitas berdasarkan pengamatan 36 data amatan sebagai berikut:

Tabel 1.
Hasil Uji Normalitas

Keterangan	Unstandarized Residual
N	36
Kolmogorov-Smirnov Z	0,794
Asymp.Sig (2-tailed)	0,554

Sumber: Data diolah, (2015)

Tabel 2.
Hasil Uji Autokorelasi

Model	Durbin-Watson
1	2,042

Sumber: Data diolah, (2015)

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa nilai Sig adalah sebesar 0,554 yang lebih besar dari 0,05, hal ini dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini terdistribusi secara normal.

Tabel 3.
Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 Pajak Daerah (X1)	0,300	3,333
Retribusi Daerah (X2)	0,451	2,219
DAU (X3)	0,599	1,670
DBH (X4)	0,207	4,821
Pertumbuhan Ekonomi (X5)	0,299	3,346

Sumber: Data diolah, (2015)

Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat nilai DW sebesar 2,042, nilai DU sebesar 1,798. Maka nilai $4 - dU$ adalah 2,202, sehingga hasil uji autokorelasinya

adalah $dU < DW < 4 - dU$ yaitu $1,798 < 2,042 < 2,202$, sehingga dapat disimpulkan data dalam penelitian ini bebas autokorelasi. Berdasarkan Tabel 3 dapat dilihat Nilai tolerance dan VIF untuk masing-masing variabel lebih besar dari 10% dan lebih kecil dari 10, sehingga dapat disimpulkan data dalam penelitian ini terbebas dari multikolinearitas.

Tabel 4.
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Sig.	Keterangan
(Constan)	0,039	
Pajak Daerah (X1)	0,237	Terbebas heteroskedastisitas
Retribusi Daerah (X2)	0,074	Terbebas heteroskedastisitas
DAU (X3)	0,892	Terbebas heteroskedastisitas
DBH (X4)	0,157	Terbebas heteroskedastisitas
Pertumbuhan Ekonomi(X5)	0,185	Terbebas heteroskedastisitas

Sumber: Data diolah, (2015)

Berdasarkan Tabel 4 dapat dilihat bahwa nilai Sig untuk masing-masing variabel lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini terbebas heteroskedastisitas. Statistis deskriptif untuk mendeskripsikan data dalam penelitian meliputi jumlah amatan, nilai minimum, dan maksimum, nilai rata-rata, serta standar deviasi.

Tabel 5.
Hasil Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Mean	Standard deviasi
Pajak daerah (X1)	36	2.052,34	504.981,56	79.440,68	114.651,98
Retribusi daerah (X2)	36	4.521,87	47.874,29	17.917,87	1.137,63
DAU (X3)	36	276.000,48	687.697,70	425.674,0	108.180,20
DBH (X4)	36	16.878,86	148.634,01	40.096,56	33.737,98
Pertumbuhan ekonomi (X5)	36	38.016,07	386.754,95	143.098,3	93.153,21
Belanja modal (Y)	36	42.555,09	254.008,35	105.292,6	47.148,71
Valid N (listwise)	36				

Sumber: Data diolah, (2015)

Berdasarkan Tabel 5 dapat dijelaskan hasil sebagai berikut:

- 1) Variabel pajak daerah memiliki nilai terendah sebesar 2.052,34 dan nilai tertinggi sebesar 504.981,56 dengan nilai rata-rata sebesar 79.440,68. standard deviasi untuk pajak daerah sebesar 114.651,98 artinya terjadi penyimpangan nilai pajak daerah yang diteliti terhadap nilai rata-ratanya sebesar sebesar 114.651,98.
- 2) Variabel retribusi daerah memiliki nilai terendah sebesar 4.521,87 dan nilai tertinggi sebesar 47.874,29 dengan nilai rata-rata sebesar 17.917,87. standard deviasi untuk retribusi daerah sebesar 1.137,63 artinya terjadi penyimpangan nilai retribusi daerah yang diteliti terhadap nilai rata-ratanya sebesar sebesar 1.137,63.
- 3) Variabel dana alokasi umum memiliki nilai terendah sebesar 276.000,48 dan nilai tertinggi sebesar 687.697,70 dengan nilai rata-rata sebesar 425.674,0 standard deviasi untuk dana alokasi umum sebesar 108.180,20 artinya terjadi penyimpangan nilai dana alokasi umum yang diteliti terhadap nilai rata-ratanya sebesar sebesar 108.180,20.
- 4) Variabel dana bagi hasil memiliki nilai terendah sebesar 16.878,86 dan nilai tertinggi sebesar 148.634,01 dengan nilai rata-rata sebesar 40.096,56. standard deviasi untuk dana bagi hasil sebesar 33.737,98 artinya terjadi penyimpangan nilai dana bagi hasil yang diteliti terhadap nilai rata-ratanya sebesar sebesar 33.737,988.
- 5) Variabel pertumbuhan ekonomi memiliki nilai terendah sebesar 38.016,07 dan nilai tertinggi sebesar 386.754,95 dengan nilai rata-rata sebesar 143.098,3.

standard deviasi untuk pertumbuhan ekonomi sebesar 93.153,21 artinya terjadi penyimpangan nilai pertumbuhan ekonomi yang diteliti terhadap nilai rata-ratanya sebesar sebesar 93.153,21.

- 6) Variabel belanja modal memiliki nilai terendah sebesar 42.555,09 dan nilai tertinggi sebesar 254.008,35 dengan nilai rata-rata sebesar 105.292,6. standard deviasi untuk pajak daerah sebesar 47.148,71 artinya terjadi penyimpangan nilai belanja modal yang diteliti terhadap nilai rata-ratanya sebesar sebesar 47.148,71.

Setelah melewati uji asumsi klasik dilanjutkan pengujian hipotesis, Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan program SPSS *for windows*. Uji kesesuaian model (uji F) dimaksudkan dalam rangka mengetahui apakah dalam penelitian ini model yang digunakan layak untuk digunakan atau tidak sebagai alat analisis. Hasil pengujian dipaparkan dalam Tabel 6 sebagai berikut:

Tabel 6.
Hasil Uji Kesesuaian Model

	Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	48057356512,602	5	9611471303	9,693	0,000
	Residual	29747696647,157	30	991589888,2		
	Total	77805053159,761	35			
2	Regression	53806082455,883	9	5978453606	6,477	0,000
	Residual	23998970703,879	26	923037334,8		
	Total	77805053159,761	35			

Sumber: Data diolah, (2015)

Berdasarkan Tabel 6 dapat dilihat bahwa nilai sig Model 1 dan 2 sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, hal ini menunjukkan bahwa variabel dalam penelitian ini layak digunakan untuk menguji pengaruh variabel terhadap variabel terikatnya.

Analisis koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui besarnya seluruh variabel bebas mampu menjelaskan variabel terikatnya. Dalam penelitian ini koefisien determinasi dilihat melalui nilai *adjusted R Square* yang dapat dilihat pada Tabel 7 sebagai berikut:

Tabel 7.
Hasil Koefisien Determinasi Model 1 dan 2

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,786	0,618	0,554	31489,5
2	0,832	0,692	0,585	30381,5

Sumber: Data diolah, (2015)

Berdasarkan Tabel 7, dapat dilihat bahwa nilai *Adjusted R square* model 2 lebih besar dari model 1, hal ini menunjukkan hasil model 2 lebih baik digunakan dalam menilai besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya.

Pengujian yang dilakukan untuk mengetahui apakah suatu variabel merupakan variabel pemoderasi adalah dengan melakukan uji interaksi. Regresi dengan melakukan uji interaksi antar variabel disebut dengan *moderated regression analysis* (MRA). Analisis MRA diolah dengan bantuan program SPSS. Hasil pengujian disajikan pada Tabel 8 sebagai berikut:

Berdasarkan Tabel 7 diperoleh hasil regresi melalui *moderated regression analysis* (MRA) adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Belanja modal} = & 108578,2 + 0,814 \text{ PD} + 3,957 \text{ RD} + 0,185 \text{ DAU} + 0,147 \text{ PE} + \\ & 0,000242 \text{ PD.PE} + 0,0000214 \text{ RD.PE} + 0,000000483 \text{ DAU.PE} \\ & + e \end{aligned}$$

Tabel 8.
Regresi Linier Berganda

Variabel	Unstandardized	t	Sig.	Hasil Uji Hipotesis
	Coefficients			
	B			
(Constant)	108578,2	1,714	0,099	-
Pajak Daerah (X ₁)	0,814	3,203	0,004	H ₁ diterima
Retribusi Daerah (X ₂)	3,957	2,714	0,012	H ₂ diterima
DAU (X ₃)	0,185	2,31	0,029	H ₃ diterima
DBH (X ₄)	-2,385	-1,37	0,182	H ₄ ditolak
Pertumbuhan Ekonomi (X ₅)	0,147	2,44	0,019	H ₅ diterima
PD.PE (X ₁ .X ₅)	0,000242	2,184	0,042	H ₆ diterima
RD.PE (X ₂ .X ₅)	0,0000214	2,181	0,038	H ₇ diterima
DAU.PE (X ₃ .X ₅)	0,000000483	0,547	0,589	H ₈ ditolak
DBH.PE (X ₄ .X ₅)	-0,0000059	-1,049	0,304	H ₉ ditolak

Sumber: Data diolah, 2015

Berdasarkan persamaan regresi diatas dapat dilihat sebagai berikut:

- 1) Nilai konstanta 108578,2 mengindikasikan apabila pajak daerah, retribusi daerah, DAU, DBH dan pertumbuhan ekonomi sama dengan dengan nol, maka belanja modal sebesar 108578,2.
- 2) Nilai koefisien regresi pajak daerah sebesar 0,814 mengindikasikan apabila pajak daerah naik sebesar satu persen, maka belanja modal naik sebesar 0,814 persen dengan asumsi variabel lainnya sama dengan nol.
- 3) Nilai koefisien regresi retribusi daerah sebesar 3,957 mengindikasikan apabila retribusi daerah naik sebesar satu persen, maka belanja modal naik sebesar 3,957 persen dengan asumsi variabel lainnya sama dengan nol.
- 4) Nilai koefisien regresi DAU sebesar 0,185 mengindikasikan apabila DAU naik sebesar satu persen, maka belanja modal naik sebesar 0,185 persen dengan asumsi variabel lainnya sama dengan nol.

- 5) Nilai koefisien regresi pertumbuhan ekonomi sebesar 0,147 mengindikasikan apabila pertumbuhan ekonomi naik sebesar satu persen, maka belanja modal naik sebesar 0,147 persen dengan asumsi variabel lainnya sama dengan nol.
- 6) Nilai koefisien moderat pajak daerah pertumbuhan ekonomi sebesar 0,000242 mengindikasikan bahwa setiap interaksi pajak daerah dengan pertumbuhan ekonomi meningkat satu persen akan mengakibatkan kenaikan pada belanja modal sebesar 0,000242 persen.
- 7) Nilai koefisien moderat retribusi daerah pertumbuhan ekonomi sebesar 0,0000214 mengindikasikan bahwa setiap interaksi retribusi daerah dengan pertumbuhan ekonomi meningkat satu persen akan mengakibatkan kenaikan pada belanja modal sebesar 0,000214 persen.
- 8) Nilai koefisien moderat DAU pertumbuhan ekonomi sebesar 0,000000483 mengindikasikan bahwa setiap interaksi DAU dengan pertumbuhan ekonomi meningkat satu persen akan mengakibatkan kenaikan pada belanja modal sebesar 0,000000483 persen.

Berdasarkan Tabel 8 dapat dilihat bahwa, hasil uji signifikansi individual variabel pajak daerah sebesar 0,004 dan nilai koefisien regresi sebesar 0,184, hal ini mengindikasikan bahwa pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan pada belanja modal, sehingga hipotesis pertama diterima. Hasil uji signifikansi individual variabel retribusi daerah sebesar 0,012 dan nilai koefisien regresi sebesar 3,917, hal ini mengindikasikan bahwa retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan pada belanja modal, sehingga hipotesis kedua diterima.

Hasil uji signifikansi individual variabel DAU sebesar 0,029 dan nilai koefisien regresi sebesar 0,185, hal ini mengindikasikan bahwa DAU berpengaruh positif dan signifikan pada belanja modal, sehingga hipotesis ketiga diterima. Hasil uji signifikansi individual variabel DBH sebesar 0,182 dan nilai koefisien regresi sebesar -2,385, hal ini mengindikasikan bahwa DBH tidak berpengaruh pada belanja modal, sehingga hipotesis keempat ditolak. Sedangkan hasil uji signifikansi individual variabel Pertumbuhan Ekonomi sebesar 0,019 dan nilai koefisien regresi sebesar 0,147, hal ini mengindikasikan bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan pada belanja modal, sehingga hipotesis kelima diterima.

Hasil uji signifikansi individual kemampuan Pertumbuhan Ekonomi mempengaruhi pengaruh pajak daerah pada belanja modal sebesar 0,042 dan nilai koefisien regresi sebesar 0,000242, hal ini mengindikasikan bahwa Pertumbuhan Ekonomi mampu memoderasi pengaruh pajak daerah pada belanja modal, sehingga hipotesis keenam diterima. Hasil uji signifikansi individual kemampuan Pertumbuhan Ekonomi mempengaruhi pengaruh retribusi daerah pada belanja modal sebesar 0,038 dan nilai koefisien regresi sebesar 0,0000214, hal ini mengindikasikan bahwa Pertumbuhan Ekonomi mampu memoderasi pengaruh retribusi daerah pada belanja modal, sehingga hipotesis ketujuh diterima.

Hasil uji signifikansi individual kemampuan Pertumbuhan Ekonomi mempengaruhi pengaruh DAU pada belanja modal sebesar 0,589 dan nilai koefisien regresi sebesar 0,000000483, hal ini mengindikasikan bahwa Pertumbuhan Ekonomi tidak mampu memoderasi pengaruh DAU pada belanja

modal, sehingga hipotesis kedelapan ditolak. Hasil uji signifikansi individual kemampuan Pertumbuhan Ekonomi mempengaruhi pengaruh DBH pada belanja modal sebesar 0,304 dan nilai koefisien regresi sebesar -0,0000059, hal ini mengindikasikan bahwa Pertumbuhan Ekonomi tidak mampu memoderasi pengaruh DBH pada belanja modal, sehingga hipotesis kesembilan ditolak.

Meningkatnya pajak daerah yang diterima daerah, semakin tinggi pula belanja modal yang dialokasikan daerah, semakin banyak pajak daerah yang diperoleh semakin memungkinkan daerah tersebut untuk memenuhi kebutuhan belanjanya terutama untuk meningkatkan pelayanan publik, dimana hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tersebut telah mampu untuk mandiri. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Arifin (2014) dan Karina (2013) yang mengatakan pajak daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal.

Meningkatnya retribusi daerah yang diterima daerah, semakin tinggi pula belanja modal yang dialokasikan daerah, semakin banyak retribusi daerah yang diperoleh semakin memungkinkan daerah tersebut untuk memenuhi kebutuhan belanjanya terutama untuk meningkatkan pelayanan publik, dimana hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tersebut telah mampu untuk mandiri. Hasil penelitian ini juga ini didukung oleh hasil penelitian Sulistyowati (2011) dan Karina (2013), yang mengatakan retribusi daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal.

Meningkatnya jumlah DAU yang diterima Pemerintah Daerah, maka akan semakin meningkat juga belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah. Semakin tinggi DAU yang diterima, semakin memungkinkan daerah tersebut untuk

memenuhi kebutuhan belanjanya terutama untuk meningkatkan pelayanan publik. Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian Harianto (2007), Andriana (2008) dan Mayasari (2014) yang mengatakan DAU berpengaruh positif terhadap belanja modal.

DBH yang diterima oleh daerah dari pemerintah pusat tidak menjadi sumber pendanaan utama pemerintah daerah untuk belanja daerahnya, hal ini mengindikasikan bahwa daerah tidak mengalokasikannya untuk Belanja Modal, akan tetapi digunakan untuk hal-hal lain yang tujuannya untuk membangun daerah, terutama pengalokasian ke dalam sektor-sektor belanja yang lain, yaitu ke dalam sektor belanja operasi, dengan kata lain dalam membiayai belanja modalnya, Pemerintah Daerah tidak ketergantungan sepenuhnya terhadap bantuan dari pemerintah pusat. Dengan ini dapat dikatakan bahwa dalam membiayai belanja modal Kabupaten/Kota di Provinsi Bali sudah memaksimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerahnya, hal ini dapat menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah. Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian Darmayasa (2014), Wandira (2013), dan Maryadi (2014) yang mengatakan DBH berpengaruh positif terhadap belanja modal. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Jiwatami (2013), yang mengatakan DBH tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi suatu daerah, maka akan semakin besar pula pendapatan yang diterima oleh daerah. Dengan semakin besar pendapatan yang diperoleh daerah, maka pengalokasian belanja oleh pemerintah daerah akan lebih besar untuk meningkatkan pelayanan publik dan semakin besar

Belanja Daerah yang dikeluarkan terutama belanja modal, maka akan semakin bagus Pertumbuhan Ekonomi yang ada. Bila PDRB mengalami peningkatan maka belanja modal juga akan mengalami peningkatan. Hasil penelitian ini bersesuaian dengan Salih (2012), berpendapat bahwa. ukuran, kapasitas belanja, dan efektif menggunakan belanja modal dalam proses pembangunan sangat mempengaruhi Pertumbuhan ekonomi (Sharma, 2012).

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi suatu daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan masyarakat untuk membayar kewajibannya kepada pemerintah daerah. Sehingga sumber penerimaan daerah meningkat terutama berasal dari pajak daerah semakin tinggi. Minat investor untuk berinvestasi di daerah akan meningkat apabila pertumbuhan ekonomi di suatu daerah juga meningkat, yang juga dapat berimbas pada peningkatan perolehan PAD terutama yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah.

Pada awalnya secara parsial DAU memiliki pengaruh positif pada belanja modal, namun hasil dari pengujian ini sangat bertolak belakang dengan hasil uji hipotesis ketiga. Pertumbuhan Ekonomi ternyata gagal meningkatkan pengaruh DAU terhadap belanja modal. Semakin tingginya penerimaan PAD daerah, diduga mengakibatkan DAU yang diperoleh daerah tidak serta merta menjadi sumber pendaanaan utama yang digunakan Daerah dalam menjalankan pemerintahannya, dengan kata lain dalam membiayai belanja modal Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Pemerintah Daerah tidak ketergantungan sepenuhnya terhadap bantuan dari pemerintah pusat.

Masuknya variabel pertumbuhan ekonomi sebagai variabel pemoderasi dalam pengaruh dana bagi hasil pada belanja modal, ternyata juga tidak mampu memperkuat pengaruh dana bagi hasil pada belanja modal. Semakin tingginya pertumbuhan ekonomi ternyata tidak mampu memperkuat pengaruh dana bagi hasil pada belanja modal. Hal ini diduga karena, DBH yang diterima oleh daerah dari pemerintah pusat tidak menjadi sumber pendanaan utama pemerintah daerah untuk belanja daerahnya, dengan kata lain dalam membiayai Belanja Modal di Provinsi Bali, Pemerintah Daerah tidak ketergantungan sepenuhnya terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.

SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Bagi Hasil (DBH) Pada Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan pada Belanja Modal Kabupaten/Kota Provinsi Bali tahun 2009-2013.
- 2) Retribusi Daerah berpengaruh positif signifikan pada Belanja Modal Kabupaten/Kota Provinsi Bali tahun 2009-2013.
- 3) DAU berpengaruh positif signifikan pada Belanja Modal Kabupaten/Kota Provinsi Bali tahun 2009-2013.

- 4) DBH tidak berpengaruh pada Belanja Modal Kabupaten/Kota Provinsi Bali tahun 2009-2013.
- 5) Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif signifikan pada Belanja Modal Kabupaten/Kota Provinsi Bali tahun 2009-2013.
- 6) Pertumbuhan Ekonomi mampu memoderasi pengaruh Pajak Daerah pada Belanja Modal Kabupaten/Kota Provinsi Bali tahun 2009-2013.
- 7) Pertumbuhan Ekonomi mampu memoderasi pengaruh Retribusi Daerah pada Belanja Modal Kabupaten/Kota Provinsi Bali tahun 2009-2013.
- 8) Pertumbuhan Ekonomi tidak mampu memoderasi pengaruh DAU pada Belanja Modal Kabupaten/Kota Provinsi Bali tahun 2009-2013.
- 9) Pertumbuhan Ekonomi tidak mampu memoderasi pengaruh DBH pada Belanja Modal Kabupaten/Kota Provinsi Bali tahun 2009-2013.

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Daerah diharapkan agar lebih mampu lagi menggali dan lebih meningkatkan penerimaan daerah terutamat yang berasal dari sektor PAD, seperti meningkatkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dalam memacu peningkatan PAD. Peningkatan PAD akan membuat Pemerintah Daerah lebih mandiri dalam mendanai seluruh aktivitas pemerintahan dan tidak selalu tergantung terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.
- 2) Pemerintah daerah hendaknya dapat membuat peraturan yang digunakan dalam mengalokasikan besaran Dana Bagi Hasil yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat. Sehingga Pemerintah Daerah memiliki aturan

dan syarat-syarat yang dapat mengatur pengalokasian dana bagi hasil dan ada tujuan yang jelas dari penggunaan dana bagi hasil itu sendiri, baik akan digunakan dalam pengalokasian belanja modal maupun belanja operasi.

- 3) Saran untuk peneliti selanjutnya, diharapkan untuk dapat meneliti variabel-variabel lain atau sumber-sumber penerimaan lainnya yang dapat mempengaruhi besarnya belanja modal seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), SILPA, Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah maupun dari aspek non keuangan seperti kebijakan pemerintah, kondisi makro ekonomi dan lain lain.
- 4) Peneliti selanjutnya diharapkan untuk memperbanyak jumlah sampel Kabupaten/Kota, khususnya di luar Provinsi Bali, Hal ini bertujuan agar semakin banyak diketahui daerah mana saja yang sudah mandiri maupun yang belum mandiri. Selain itu sebaiknya digunakan data yang lebih lengkap dengan rentang periode waktu penelitian yang lebih panjang sehingga lebih mampu untuk dapat dilakukan generalisasi atas hasil penelitian tersebut.

REFERENSI

- Andriana. 2008. Pengaruh PAD, DAU Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004-2007. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
- Akai, N. and Sakata, M. 2002. *Fiscal Decentralization Contributes to Economic Growth: Evidence form State-Level Cross-Section Data for the United States. Journal of Urban Economics*, (52): pp: 93-108.
- Arifin, Zaenal. 2014. Pengaruh Pajak daerah, Retribusi daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Modal di Provinsi Riau. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.

- Bodman, Philip. Kelly-Ana Heaton dan Andrew Hodge. 2009. *Fiscal Decentralisation and Economic Growth: A Bayesian Model Averaging Approach. MRG@UQ Discussion Paper*, School of Economics, University of Queensland.
- Darmayasa, I.N. 2014. Faktor-Faktor Penentu Alokasi Belanja Modal dalam APBD Pemerintah Provinsi Bali. Politeknik Negeri Bali.
- Darwanto dan Yulia Yustikasari. 2007 Pengaruh Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Belanja Modal. *Simposium Nasional Akuntansi X*, Unhas Makasar 26-27 Juli 2007.
- Felix, Olurankinse. 2012. *Analysis of the effectiveness of capital expenditure budgeting in the local government system of Ondo State, Nigeria. Journal of Accounting and Taxation*, 4(1), pp: 1-6.
- Gunantara, Putu Candra. 2013. Pengaruh PAD dan DAU pada Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal sebagai Variabel Pemoderasi di Bali. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 7.3. Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
- Halim, Abdul dan Syukriy Abdullah. 2006. Hubungan dan masalah keagenan di Pemerintahan Daerah: sebuah peluang penelitian anggaran dan akuntansi. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*. 2(1): h: 53-64.
- Halim, Abdul, 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Harianto, David dan Priyo Hadi Adi. 2007. Hubungan antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, dan Pendapatan per Kapita. *Simposium Nasional Akuntansi X*, Makassar, 26-28 Juli 2007.
- Jensen, M. dan Meckling, W. 1976. *Theory of The Firm: Managerial Behaviour, Agency Costs and Ownership Structure. Journal of Financial Economics*, 3(4), pp: 305-360.
- Jiwatami, Sandhyakalaning. 2013. Pengaruh Kemandirian Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Pegawai terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah (Pada Kabupaten/Kota di Indonesia Periode 2008-2012). *Simposium Nasional Akuntansi XVI*, Manado, 25-28 September 2013.
- Karina, Hapsari Citra. 2014. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAU, dan DAK Terhadap Alokasi Belanja Modal di Kabupaten dan Kota Yogyakarta. Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta.

- Kawedar, warsito dkk, 2008. *Akuntansi Sektor Publik*, Semarang UNDIP.
- Lin, Justin Yifu dan Zhiqiang Liu. 2000. *Fiscal Decentralization and Economic Growth in China, Economic Development and Cultural Change Chicago*. 49. Hal : 1-21.
- Maggi, Eva Maria dan Ladurner, Ulrich. 2009. *Federal Features and Financial Decentralization. Inhouse Seminar. Eurac Research*.
- Malik, Shahnawaz, Mahmood-ul-hassan and Shahzad Hussain. 2006. *Fiscal Decentralization and Economic Growth in Pakistan. Department of Economics, Bahauddin Zakariya University, Multan, Pakistan*.
- Maryadi. 2014. Pengaruh PAD, DAU, DBH, Silpa dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2012. Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang.
- Mayasari, Luh Putu Rani. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD dan DAU Terhadap Pengalokasi Anggaran Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten Buleleng. *E-Journal SI*. Jurusan Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha.
- Oates, Wallace. E. 1993. *Fiscal Decentralization and Economic Development. National Tax Journal*, 46 (2) : h: 237-43
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- _____. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Salih, Mohame Abdel Rahman. 2012. *The Relationship between Economic Growth and Government Expenditure: Evidence from Sudan. International Business Research*; 5 (8); 2012.
- Sharma, Basudev. 2012. *Government Expenditure and Economic Growth in Nepal a Minute Analysis. Journal of Business Management and Accounts. Revenue Administration Training Center, Ministry of Finance, Nepal*
- Sianturi. Agave. 2010. Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pengalokasian Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatra Utara. Fakultas Ekonomi Universitas Sumatra Utara.

- Sugiardi, Ni Putu Dwi Eka Rini. Pengaruh PAD, DAU, dan SILPA pada Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 7.2 (2014): 477-495. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung :CV. Alfabeta.
- Sulistyowati, Diah. 2011. Pengaruh Pajak daerah, Retribusi daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Modal. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
- Taiwo, Muritala dan Taiwo Abayomi. 2011. *Government Expenditure and Economic Development. European Journal of Business and Management*, 3(9).
- Vo, Duc Hong. 2009. The Economics of Fiscal Decentralization. *Journal of Economic Survey*, 24(4) :657–679. UWA Business School, University of Western Australia.
- Wandira, Arbie G. 2012. Pengaruh PAD, DAU, DAK dan DBH terhadap Pengalokasian belanja modal pada Pemerintah Propinsi Se-Indonesia. *Jurnal Ekonomi* Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia.
- Yossi Mamonto, Sandry. J. B. Kalangi dan Krest D. Tolosang. 2013. Pengaruh Pajak daerah dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan Universitas Sam Ratulangi Manado.